
TRANSFORMASI MEDIA DAN DEMOKRATISASI PASCA ORDE BARU: ANALISIS PERILAKU POLITIK MAHASISWA JURUSAN PPKn DI ERA DIGITAL

Dien Solia Sipayung¹, Inriyani Pandiangan², Nur Annisa³, Ripka Perangin Angin⁴, Rini Santia Limbong⁵, Tamara Sesi Haloho⁶, Julia Ivanna⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Negeri Medan

Email: diensipayung89@gmail.com¹, inriyanipandiangan55@gmail.com², nurannisa2069@gmail.com³, ribkacornelia15@gmail.com⁴, rinilimbong272@gmail.com⁵, tamarasihaloho076@gmail.com⁶, juliaivanna@unimed.ac.id⁷

Abstrak: Penelitian ini mengkaji transformasi media dan proses demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru, dengan fokus pada perilaku politik mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di era digital. Perubahan lanskap media dari kontrol pemerintah menuju kebebasan digital telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas dan dinamis, khususnya bagi generasi muda. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggambarkan bagaimana mahasiswa PPKn memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi, diskusi, dan kampanye politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa menunjukkan partisipasi aktif dan kreatif di ruang digital, mereka juga menghadapi tantangan serius seperti rendahnya literasi politik dan digital, serta risiko terpapar disinformasi dan polarisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis digital sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik mahasiswa secara kritis dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Demokratisasi, Media Digital, Mahasiswa PPKn, Partisipasi Politik, Literasi Digital.

***Abstract:** This study examines media transformation and the democratization process in post-New Order Indonesia, focusing on the political behavior of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) students in the digital era. The shift in the media landscape from government control to digital freedom has opened up broader and more dynamic spaces for political participation, particularly for the younger generation. Using a descriptive qualitative approach, this study describes how PPKn students utilize social media as a means of information, discussion, and political campaigning. The results indicate that although students demonstrate active and creative participation in the digital space, they also face serious challenges such as low political and digital literacy, as well as the risk of exposure to disinformation and polarization. This study recommends strengthening digital-based citizenship education as a strategy to improve the quality of critical and responsible student political participation.*

***Keywords:** Democratization, Digital Media, PPKn Students, Political Participation, Digital Literacy.*

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya rezim Orde Baru, perkembangan demokrasi di Indonesia ditandai dengan kebebasan pers dan keterbukaan ruang publik. Jika sebelumnya media dibatasi oleh kontrol pemerintah, maka era reformasi memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan mengakses informasi dari berbagai sumber. Transformasi ini

semakin diperkuat dengan hadirnya era digital, di mana media sosial berperan penting dalam membentuk opini publik dan memperluas partisipasi politik. Media digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang baru bagi berlangsungnya proses demokratisasi yang lebih dinamis.

Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok intelektual muda turut merasakan dampak dari perubahan ini. Mereka tidak lagi sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam membangun wacana politik di ruang digital. Mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya, memiliki peran strategis karena berkaitan erat dengan pemahaman tentang demokrasi dan kewarganegaraan. Media sosial memberikan peluang bagi mereka untuk berdiskusi, menyebarkan gagasan, serta berpartisipasi dalam isu-isu politik yang berkembang di masyarakat. Aktivitas yang dilakukan di ranah digital ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara keterlibatan mahasiswa di media sosial dengan meningkatnya partisipasi politik (Sihitei & dkk, 2024).

Namun, keterbukaan akses digital tidak selalu sejalan dengan kualitas keterlibatan. Literasi digital menjadi kunci penting yang menentukan sejauh mana mahasiswa mampu memanfaatkan media secara kritis dan bertanggung jawab. Tanpa literasi yang baik, mereka berisiko terjebak dalam arus informasi yang bias dan menyesatkan. Faktor internal seperti rasa ingin tahu dan motivasi diri juga berpengaruh besar terhadap tingkat literasi digital yang dimiliki. Hal ini memperlihatkan bahwa keterampilan teknis semata tidak cukup, melainkan perlu didukung oleh kesadaran dan sikap kritis dalam menggunakan media (Rini, 2022).

Selain itu, arus informasi di media sosial sering kali lebih menekankan aspek emosional daripada substansi. Banyak mahasiswa terjebak pada konten politik yang viral tetapi dangkal, sehingga diskursus yang terbentuk cenderung kurang mendalam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah media sosial benar-benar memperkuat demokrasi atau justru hanya menghasilkan keterlibatan politik yang bersifat permukaan. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya tantangan besar dalam mengarahkan partisipasi mahasiswa agar tetap berkualitas dan berbasis pada pemikiran kritis (Rini, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara serta studi dokumentasi dengan mahasiswa/mahasiswi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa/mahasiswi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Media Massa pada masa Orde Baru

Orde Baru adalah era pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Selama masa ini, media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk citra pemerintah dan masyarakat, serta dalam menyebarkan ideologi Orde Baru. Namun, media pada masa itu juga terkenal karena adanya sensor dan kendali ketat dari pemerintah. Media massa pada masa Orde Baru di Indonesia dapat dilihat dalam dua aspek utama, yaitu media cetak dan media penyiaran. Dalam media cetak, pemerintah mendirikan Badan Koordinasi Pers dan Penyiaran (BKP3) pada tahun 1975, yang bertujuan mengendalikan isi berita yang diterbitkan oleh surat kabar dan majalah. Dengan demikian, banyak media cetak hanya mampu menyajikan informasi yang sesuai dengan narasi pemerintah. Namun, hal ini juga menciptakan sejumlah media yang bersifat oposisi terhadap pemerintah, seperti Tabloid Tempo yang berusaha menyuarakan pandangan kritis.

Di sisi lain, media penyiaran juga tunduk pada kendali pemerintah. Televisi Republik Indonesia (TVRI) adalah satu-satunya stasiun televisi di Indonesia pada masa Orde Baru. Hal ini membuat pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan isi program televisi. Sebagian besar program televisi juga digunakan untuk mendukung propaganda politik Orde Baru. Walaupun ada media penyiaran swasta seperti RCTI dan SCTV, pemerintah juga mengendalikan dan mengatur program-program mereka secara ketat. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga memantau konten media asing yang masuk ke Indonesia. Buku, film, dan majalah dari luar negeri harus melewati sensor pemerintah, yang seringkali mengakibatkan pemotongan atau penyensoran konten yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi Orde Baru.

Meskipun media di bawah Orde Baru seringkali dilihat sebagai alat propaganda pemerintah, terdapat beberapa keuntungan yang bisa diidentifikasi. Pertama, era ini menyaksikan perkembangan industri media di Indonesia. Banyak perusahaan media dan penerbitan didirikan selama Orde Baru, dan ini membuka lapangan pekerjaan serta menggerakkan ekonomi. Kedua, pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses ke pendidikan melalui media. Program-program seperti "Belajar Bersama TV" memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Namun, potret media dalam Orde Baru juga mencerminkan ketidakbebasan pers dan ketidakseimbangan informasi. Pengendalian yang ketat atas isi media dan sensor yang kuat membuat media tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dengan efektif. Informasi yang bersifat kritis terhadap pemerintah sering kali dibungkam, dan hal ini merugikan masyarakat yang kehilangan akses ke berita dan perspektif yang beragam. Potret media dalam Orde Baru di Indonesia mencerminkan kendali pemerintah yang kuat dan ketidakbebasan pers yang berdampak pada keragaman informasi. Meskipun ada beberapa manfaat ekonomi dan pendidikan yang dihasilkan selama era tersebut, kebebasan media merupakan nilai yang sangat penting dalam memastikan masyarakat memiliki akses ke informasi yang beragam dan dapat menjalankan peran pengawasan terhadap pemerintah dengan efektif (Fariardhany, 2023).

Demokratisasi dan Ruang Partisipasi Politik Baru

Demokratisasi adalah sebuah proses dinamis yang tak hanya berhenti pada reformasi institusi politik formal, melainkan juga menuntut evolusi dalam cara masyarakat berpartisipasi. Di era modern, partisipasi politik telah melampaui kerangka tradisional seperti pemilu dan keanggotaan partai politik. Pergeseran ini memunculkan ruang-ruang partisipasi politik baru yang lebih inklusif dan beragam, yang pada gilirannya mencerminkan esensi demokrasi yang lebih terbuka dan adaptif. Kehadiran ruang-ruang ini adalah respons alami terhadap ketidakmampuan sistem formal untuk sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas aspirasi publik.

Salah satu inovasi paling signifikan adalah munculnya ruang partisipasi digital. Perkembangan pesat internet dan media sosial telah mengubah lanskap interaksi politik secara fundamental. Jika di masa lalu masyarakat cenderung pasif sebagai objek kebijakan, kini mereka telah menjadi aktor yang aktif. Melalui platform digital, individu dapat dengan cepat menyuarakan

pendapat, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan bahkan menggalang dukungan publik untuk suatu isu. Media sosial menjadi kanal yang sangat efektif, terutama bagi generasi muda, untuk menyalurkan energi politik mereka. Namun, fenomena ini tidak datang tanpa tantangan. Ruang digital juga menjadi lahan subur bagi penyebaran disinformasi, polarisasi, dan hoaks, yang dapat melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Kesenjangan akses digital juga memperburuk ketidaksetaraan partisipasi, di mana mereka yang memiliki literasi dan akses teknologi lebih baik cenderung lebih dominan (Sari, Zetra, & Valentina, 2021).

Di sisi lain, demokratisasi juga menumbuhkan partisipasi yang berakar kuat di tingkat lokal melalui forum warga, musyawarah desa, dan organisasi masyarakat sipil. Mekanisme ini menciptakan ruang dialog langsung antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Keberadaan forum-forum lokal ini mengukuhkan konsep demokrasi partisipatif, yang mengalihkan kekuasaan dari pusat ke basis komunitas. Dengan demikian, demokratisasi tidak hanya berjalan di tingkat nasional, tetapi juga mengakar kuat di setiap lapisan masyarakat, memberikan warga kesempatan nyata untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Lebih dari itu, peran organisasi masyarakat sipil(CSO) tidak bisa diabaikan. Pasca-reformasi, CSO berhasil mengisi ruang politik yang sebelumnya tertutup, berperan sebagai pengawas independen terhadap kekuasaan negara. CSO kini menjadi jembatan penting untuk mengartikulasikan kepentingan publik, bahkan dalam isu-isu sensitif. Mereka juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam perumusan kebijakan atau, sebaliknya, sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis. Dinamika ini menegaskan bahwa demokratisasi tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat sipil sebagai aktor politik non-negara yang vital. Meski demikian, jalan menuju partisipasi yang substantif masih panjang. Berbagai tantangan muncul, mulai dari disinformasi yang masif di ruang digital hingga keterbatasan literasi politik yang membuat masyarakat sulit membedakan informasi kredibel dari hoaks. Ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan sumber daya juga menjadi hambatan serius. Tanpa adanya regulasi yang memadai dan program literasi digital yang masif, ruang digital justru bisa menjadi bumerang, memperkuat polarisasi dan memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk

membangun pendidikan demokrasi dan literasi digital yang kuat, agar partisipasi politik masyarakat dapat berlangsung secara sehat, produktif, dan membangun (Amalia, 2021).

Perilaku Politik Mahasiswa Jurusan PPKn di Era Digital

Transformasi digital telah mengubah landscape partisipasi politik generasi muda termasuk mahasiswa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) perilaku politik mahasiswa tidak lagi terbatas pada ruang fiksi seperti kampus atau forum diskusi konvensional melainkan telah meluas di ruang digital yang bersifat dinamis interaktif dan terbuka. Di era digital mahasiswa PPKN kini mengakses isu-isu politik melalui media sosial seperti Instagram, Tik tok dan Twitter yang menjadi sumber utama informasi politik. Konten yang bersifat visual dan naratif lebih mudah diterima terutama jika disampaikan oleh influencer politik atau akun edukasi yang mampu mengemas isu-isu kompleks secara ringan dan menarik. Media digital tidak hanya menjadi saluran informasi tetapi juga ruang pembentukan opini dan refleksi politik yang aktif.

Mahasiswa PPKN memanfaatkan media kita sebagai pintu masuk utama untuk memahami isu-isu komentar kontemporer. Mereka mengikuti akun-akun edukasi, lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil untuk memanfaatkan informasi relevan dan terkini tapi di sisi lain media digital juga memungkinkan mahasiswa untuk mengakses berbagai perspektif politik termasuk bersifat kritis terhadap pemerintah atau dominasi narasi tertentu. Pemanfaat media digital oleh mahasiswa tidak hanya bersifat pasif mereka juga aktif memproduksi konten politik seperti infografis, video pendek, opini publik dan kampanye digital yang disebarakan melalui media sosial.

Partisipasi politik mahasiswa di area kita mengambil berbagai bentuk seperti diskusi online menjadi salah satu bentuk partisipasi yang paling umum baik melalui kolom komentar, forum daring, maupun ruang diskusi seperti Twitter space dan Instagram live, dan diskusi ini mahasiswa tidak hanya menyampaikan pendapat tetapi juga melakukan klarifikasi, debat dan refleksi terhadap isu politik yang sedang berkembang. Kampanye digital juga menjadi medium penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi politik. Mereka terlibat dalam gerakan sosial, petisi online dan kampanye isu seperti anti korupsi, hak asasi manusia dan pemilu bersih.

Meskipun menunjukkan partisipasi yang aktif dan kreatif mahasiswa PPKN juga menghadapi tantangan serius terkait literasi politik dan digital. Literasi politik yang rendah dapat menyebabkan mahasiswa terjebak dalam narasi populis atau ekstrem yang tidak berbasis pada data

dan prinsip demokrasi. Sementara itu literasi digital yang lemah membuat mereka rentan terhadap manipulasi algoritma, misi informasi dan eksploitasi data pribadi. Oleh karena itu peningkatan literasi politik dan digital menjadi aspek krusial yang harus diperkuat dalam pendidikan PPKN. Mahasiswa perlu di bekali keterampilan berpikir kritis kemampuan verifikasi informasi dan etika media agar dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab dan konstruktif dalam ruang politik digital (Setiawan, Syoba, & Triuspita, 2025).

Tantangan dan Prospek Demokrasi Digital

Munculnya teknologi digital telah mengubah interaksi masyarakat dengan pemerintah dan dinamika politik. Platform media sosial dan alat digital lainnya memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi politik serta memfasilitasi partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di era digital, informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai sumber, menjadikan partisipasi politik lebih inklusif. Meski demikian, tantangan serius muncul terkait disinformasi yang dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan warga. Penyebaran disinformasi merusak kualitas diskusi publik serta memicu polarisasi. Manipulasi elektoral juga menjadi ancaman, di mana pihak tertentu menggunakan teknik manipulasi untuk mempengaruhi opini publik dan hasil pemilihan.

Keuntungan partisipasi politik melalui teknologi digital mencakup kemudahan membagikan informasi, memungkinkan warga untuk menjadi pembentuk opini. Namun, tantangan bagi masyarakat muncul dalam memilah informasi agar tidak terjebak dalam hoaks. Disinformasi dan manipulasi elektoral merupakan masalah serius di era digital. Berita palsu bisa memanipulasi opini, mendiskreditkan lawan politik, dan memicu kerusuhan sosial, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap informasi dan sistem demokrasi. Organisasi Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Parludem) menemukan lebih dari 1.100 informasi hoaks terkait pemilu pada 2023, dengan 80% terkait pemilihan presiden (Elizamiharti & Nelfira, 2024).

Polarisasi opini politik juga meningkat akibat algoritma media sosial yang menciptakan filter bubble, sehingga warga hanya terpapar pada sudut pandang sejalan dengan keyakinan mereka. Hal ini menghambat dialog dan kompromi politik yang penting untuk demokrasi sehat. Beberapa upaya untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi:

1. Meningkatkan Literasi Digital: Edukasi mengenai dampak hoaks dan pentingnya fakta untuk mencegah penurunan kualitas demokrasi.
2. Regulasi yang Kuat: Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencegah penyebaran disinformasi serta menjaga keseimbangan kebebasan berekspresi dan perlindungan dari ancaman.
3. Memperkuat Institusi Demokrasi: Modernisasi sistem pemilu dan penguatan pengawasan untuk memastikan keamanan serta integritas pemungutan suara elektronik.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Akses informasi tentang proses pengambilan keputusan di pemerintah dan perusahaan teknologi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis: Mendorong pemahaman mengenai prinsip dan sistem demokrasi serta memberi pendidikan yang relevan dengan era digital.

Dorongan untuk inovasi dalam hukum dan regulasi terkait teknologi juga diperlukan agar sistem hukum tetap sesuai dengan perkembangan. Mengatasi krisis demokrasi akibat teknologi digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor, komitmen jangka panjang, dan upaya kolektif dari pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan individu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan demokrasi dapat terus tumbuh dan bertahan meskipun di tengah tantangan besar era digital. Upaya bersama dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat, aman, dan demokratis, demi kesejahteraan semua warga (Mudrikah, Jayanti, Setiauli, Syaputra, & Hasibuan, 2024).

KESIMPULAN

Indonesia telah mengalami perubahan drastis dari era Orde Baru yang ditandai kontrol ketat pemerintah terhadap media menuju era digital yang memberikan kebebasan dan ruang partisipasi yang jauh lebih luas. Jika pada masa Orde Baru media menjadi alat propaganda dengan sensor yang kuat, kini masyarakat dapat mengakses dan memproduksi informasi secara bebas melalui platform digital. Demokratisasi telah menciptakan beragam ruang partisipasi politik yang lebih inklusif, mulai dari forum digital hingga organisasi masyarakat sipil. Media sosial menjadi kanal utama bagi generasi muda, terutama mahasiswa PPKn, untuk menyuarakan pendapat, mengkritisi kebijakan, dan terlibat dalam gerakan sosial melalui kampanye digital dan diskusi online.

Meskipun memberikan akses informasi yang lebih luas dan partisipasi yang lebih demokratis, era digital juga menghadirkan tantangan serius berupa disinformasi, polarisasi, dan

manipulasi elektoral. Penyebaran hoaks dapat merusak kualitas diskusi publik dan mengancam integritas sistem demokrasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan literasi digital dan politik, penguatan regulasi, modernisasi institusi demokrasi, serta kolaborasi lintas sektor. Pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan era digital menjadi kunci untuk memastikan partisipasi politik yang sehat dan konstruktif. Secara keseluruhan, transformasi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital, namun memerlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan integritas sistem demokratis di tengah dinamika era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. (2021). STUDI FENOMENOLOGI PARTISIPASI POLITIK DIGITAL MAHASISWA SURABAYA DITWITTER. *The Commercium*, 177-186.
- Elizamiharti, & Nelfira. (2024). Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 61-72.
- Fariardhany, F. (2023, Oktober 16). *Potret Media dalam Era Orde Baru*. Retrieved from [kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/zarezafr/652c25d6ee794a08a6203752/potret-media-dalam-era-orde-baru](https://www.kompasiana.com/zarezafr/652c25d6ee794a08a6203752/potret-media-dalam-era-orde-baru)
- Mudrikah, A., Jayanti, E. F., Setiauli, T. C., Syaputra, T. A., & Hasibuan, H. A. (2024). Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 290-303.
- Rini, R. (2022). Literasi digital mahasiswa dan faktor faktor yang berpengaruh. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 172-173.
- Sari, L. P., Zetra, A., & Valentina, T. R. (2021). Peran Ruang Publik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik DiNagari Talang Anau. *Jurnal Niara*, 11-22.
- Setiawan, S., Syoba, K., & Triuspita, N. (2025). Pendidikan Politik di Era Teknologi Digital: Peran Media Sosial dalam Menggalang Partisipasi Mahasiswa Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilu di Indonesia. *SELAMI IPS*, 233-247.

Sihitei, V. D., & dkk. (2024). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik di Kalangan Mahasiswa PPKn Universitas Negeri Medan. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 100-103.